

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH  
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
(Studi Di Kabupaten Kampar Dan Kabupaten Rokan Hulu)**

**ABSTRAK**

OLEH : Rafida Uyun

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Menteri, Kode dan Data Wilayah Administrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Studi di Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III meliputi ; Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Tipe penelitian ini adalah tipe kualitatif, dan lokasi penelitiannya adalah di 5 (lima) desa yaitu Desa Tanah Datar, Desa Intan Jaya, Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya dan Desa Rimba Makmur di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. Ada 14 orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini dan untuk mengumpulkan dan mencari data peneliti menggunakan wawancara dalam penelitian ini, setelah data-data dikumpulkan dan akan dianalisa secara deskriptif, guna mendapatkan jawaban tentang Implementasi Pelaksanaan Peraturan Menteri ini. Setelah dilakukan penelitian dan Wawancara mendalam, adapun hasil dari penelitian tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu adalah “Cukup terimplementasi”, dengan beberapa hambatan seperti belum ditetapkannya Tapal Batas Antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu sehingga masih terjadi Dualisme Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2015 itu hanya menetapkan Kode wilayah administrasi pemerintahan sebagai identitas suatu wilayah administrasi sehingga tidak serta merta menegaskan batas antara Kabupaten yang bersanding sehingga hal-hal yang terkait batas masih sering menjadi Konflik selama belum ada kesepakatan batas tersebut dan kode wilayah ini masih dapat berubah apabila kesepakatan batas telah dicapai.

**IMPLEMENTATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS  
MINISTERIAL REGULATION NUMBER 56 OF 2015 ON CODES AND  
DATA ON ADMINISTRATIVE AREAS OF GOVERNMENT  
( Study In Kampar and Rokan Hulu districts)**

**ABSTRACT**

**BY : Rafida Uyun**

*Keywords; Implementation, ministerial regulations, codes and administrative area data*

*This study aims to find out the Implementation Of The Minister Of Home Affairs Ministerial Regulation Number 56 of 2015 On Codes and Data Of Administrative Regions Of Government (Studies in Kampar and Rokan Hulu districts). Theory used in this research is Edward III theory include; Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. This type of research is qualitative type, and the research location is 5 (five) villages, Tanah Datar village, Intan Jaya village, Muara Intan village, Rimba Jaya village, and Rimba Makmur village in Kampar and Rokan Hulu districts. There are 14 people who made the informant in this research data, researcher use interview in this research, after the data collected and will be analyzed descriptively, to get answer about Implementation of Implementation of this ministerial regulation. After conducting in-depth research and interviews, the result of research on the Implementation Of the Minister of Home Affairs Ministerial Regulation number 56 of 2015 on codes an data on administrative areas of Kampar regency and Rokan Hulu district are “Adequately Implemented”, with some obstacles such as the non-establishment of the boundary between Kampar regency and Rokan hulu district so that there is still a dualism system of government. The regulation of the minister of home affairs number 56 of 2015 only stipulates the code of the administrative area of government as the identity of an administrative area so that it does not necessarily confirm the boundaries of the antecedents of the adjacent districts so that border-related matters are still often conflicts as long as there is no such boundary agreement and the territorial code can still change if a boundary agreement has been reached.*